

## “Exploring The Openness Of Participatory Space: Case Studies From Contemporary Indonesia”

**Asyifa Khumaira Nurhamdani, Jessica Caroline Charis, Fenika Gabriella**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Ilmu Komunikasi, Universitas Pelita Harapan

[01689230006@student.uph.edu](mailto:01689230006@student.uph.edu), [01689230001@student.uph.edu](mailto:01689230001@student.uph.edu), [01689230013@student.uph.edu](mailto:01689230013@student.uph.edu)

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Dalam konteks Indonesia, platform digital telah menjadi sarana penting untuk mendorong partisipasi publik dan memastikan keterbukaan serta inklusivitas ruang partisipatif. Konsep "Openness of Participatory Space" menjadi fokus utama dalam memahami bagaimana platform digital dapat digunakan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam diskusi publik. Dengan menganalisis teori demokrasi partisipatif, keadilan sosial, dan komunikasi publik, makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memastikan ruang partisipatif digital yang terbuka dan inklusif di Indonesia. Melalui studi kasus pemanfaatan platform digital seperti Kitabisa.com, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam isu-isu sosial dan politik melalui crowdfunding dan proyek sosial lainnya. Dengan demikian, pemahaman konsep Openness of Participatory Space menjadi kunci dalam memperkuat partisipasi publik melalui media digital di Indonesia.

Kata Kunci : Teknologi Informasi, Platform Digital, Partisipasi Publik

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Platform digital, seperti media sosial, blog, dan forum online, menawarkan ruang partisipatif yang memungkinkan individu untuk terlibat dalam berbagai diskusi dan pertukaran informasi. Dalam hal ini, ruang partisipatif digital menciptakan peluang yang signifikan bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, berkolaborasi, dan mempengaruhi perubahan sosial. Masyarakat dapat memanfaatkan platform-platform ini untuk menyampaikan pandangan mereka tentang isu-isu penting, berbagi pengalaman, dan membangun jaringan yang lebih luas (Strömbäck et al., 2020).

Namun, tidak semua ruang partisipatif digital bersifat terbuka dan inklusif. Beberapa platform digital mungkin memiliki batasan akses yang ketat, kontrol konten yang berlebihan, atau budaya partisipasi yang tidak sehat. Kondisi ini dapat menciptakan hambatan bagi partisipasi masyarakat dan membatasi potensi ruang partisipatif dalam mendorong perubahan positif. Misalnya, kebijakan sensor atau moderasi yang ketat dapat membatasi kebebasan berekspresi, sementara algoritma yang bias dapat mempersempit jangkauan informasi yang diterima pengguna. Selain itu, budaya partisipasi yang tidak sehat, seperti cyberbullying atau trolling, dapat menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi individu untuk berpartisipasi secara aktif.

Indonesia sebagai negara dengan populasi internet terbesar keempat di dunia, mengalami pertumbuhan pesat dalam penggunaan media digital. Penggunaan media digital di Indonesia telah meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, dan politik. Platform digital telah menjadi alat penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam isu-isu publik dan politik, seperti kampanye sosial, advokasi hak asasi manusia, dan pemantauan kebijakan pemerintah. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam memastikan keterbukaan dan inklusivitas ruang partisipatif digital di Indonesia (Kozinets & Jenkins, 2022).

Adapun permasalahan yang sampai kini masih terjadi adalah pada akses internet yang tidak merata masih menjadi masalah di beberapa daerah, mengakibatkan kesenjangan digital yang membatasi partisipasi masyarakat. Selain itu, isu keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama, mengingat maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi dan serangan siber. Namun konten yang bersifat disinformasi atau hoaks seringkali menyebar dengan cepat di platform digital, menimbulkan kebingungan dan potensi konflik di masyarakat (Wohlwend, 2019). Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika ruang partisipatif digital di Indonesia dan mencari solusi untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut agar dapat memaksimalkan potensi positif dari media digital dalam mendorong perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Maka penelitian ini akan mengeksplorasi keterbukaan ruang partisipatif di platform digital melalui studi kasus dari Indonesia kontemporer. Fokus utama adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterbukaan dan inklusivitas, serta mengevaluasi dampaknya terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana ruang partisipatif digital dapat dioptimalkan untuk mendukung perubahan sosial yang positif di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini:

1. Bagaimana definisi dan konsep dasar tentang "Openness of Participatory Space"?
2. Apa saja teori dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami tingkat keterbukaan ruang partisipatif?
3. Bagaimana platform digital dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi publik di Indonesia?
4. Apa saja tantangan dan peluang dalam memastikan keterbukaan dan inklusivitas ruang partisipatif digital di Indonesia?

## C. Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk:

1. Memahami konsep "Openness of Participatory Space" dan pentingnya dalam konteks media digital.
2. Menganalisis berbagai teori dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami tingkat keterbukaan ruang partisipatif.
3. Membahas bagaimana platform digital dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi publik di Indonesia.
4. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memastikan keterbukaan dan inklusivitas ruang partisipatif digital di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Openness of Participatory Space

#### 1. Definisi Openness of Participatory Space

Definisi keterbukaan ruang partisipatif (*openness of participatory space*) menurut para ahli mencakup berbagai dimensi yang menekankan pada aspek aksesibilitas, inklusivitas, kebebasan berekspresi, dan transparansi. (Harvey, 2018) mengemukakan bahwa keterbukaan ruang partisipatif merujuk pada kemampuan platform untuk mengizinkan pengguna berkontribusi dan berpartisipasi tanpa hambatan signifikan, baik dari segi teknis maupun budaya. Ia menekankan bahwa partisipasi tidak hanya tentang akses fisik, tetapi juga tentang kemampuan untuk menyuarakan pendapat dan terlibat dalam dialog yang bermakna. Hal ini mencakup kemudahan dalam mempublikasikan konten, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan pengguna lain.

Aadapun (Reich, 2011) menambahkan bahwa keterbukaan ruang partisipatif juga mencakup dimensi inklusivitas, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. Mereka menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang terpinggirkan atau kurang terwakili. Dalam konteks ini, inklusivitas juga berarti menghargai dan memperhitungkan keragaman pendapat dan perspektif, serta memastikan bahwa semua suara didengar dan diperhatikan.

(Manca et al., 2021) memberikan perspektif tambahan dengan menyoroti pentingnya kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap sensor atau pengawasan yang berlebihan. Menurutnya, ruang partisipatif yang terbuka harus menjamin bahwa pengguna dapat menyampaikan pandangan mereka tanpa takut akan pembalasan atau penindasan. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak digital dan privasi individu, serta transparansi dalam pengelolaan dan moderasi konten. Fuchs juga menekankan bahwa keterbukaan memerlukan adanya mekanisme akuntabilitas di mana platform bertanggung jawab atas kebijakan dan praktik mereka, serta memberikan pengguna kontrol atas data dan privasi mereka.

Lebih lanjut, (Ng, 2020) menguraikan bahwa keterbukaan ruang partisipatif melibatkan proses dialogis yang mengedepankan partisipasi aktif dan keterlibatan penuh dari semua pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa ruang partisipatif harus memungkinkan interaksi dua arah yang dinamis dan konstruktif, di mana semua peserta memiliki kesempatan untuk mempengaruhi agenda dan hasil diskusi. Carpentier juga menekankan bahwa keterbukaan mencakup komitmen untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara, di mana tidak ada kelompok yang mendominasi atau memonopoli ruang partisipatif (Yurchenko et al., 2020).

Maka dapat disimpulkan definisi keterbukaan ruang partisipatif mencerminkan kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, berinteraksi, dan mempengaruhi proses serta hasil dari komunikasi dan kolaborasi di ruang digital. Keterbukaan ini memastikan bahwa platform digital tidak hanya inklusif dan aksesibel, tetapi juga mendukung kebebasan berekspresi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dan bermakna.

#### 2. Konsep Openness of Participatory Space

Pada hakikatnya *Openness of Participatory Space* mengacu pada tingkat aksesibilitas dan inklusivitas ruang partisipatif. Ruang partisipatif yang terbuka dicirikan oleh (White, 2017):

##### a) Aksesibilitas

Aksesibilitas dalam ruang partisipatif digital merujuk pada kemudahan bagi individu untuk memasuki dan berpartisipasi tanpa menghadapi hambatan yang tidak perlu. Ini mencakup aspek teknis, seperti ketersediaan perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan untuk mengakses platform digital, serta konektivitas internet yang memadai. Adapun aksesibilitas juga melibatkan desain antarmuka yang user-friendly dan inklusif, sehingga pengguna dengan berbagai kemampuan dapat menggunakannya dengan mudah. Misalnya, penyediaan fitur seperti teks alternatif untuk gambar, subtitle untuk video, dan dukungan untuk perangkat bantu bagi penyandang disabilitas adalah bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas.

Dalam lingkup sosial, aksesibilitas juga berarti menghilangkan hambatan ekonomi, geografis, dan budaya yang dapat menghalangi individu untuk berpartisipasi. Dengan begitu maka platform digital harus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua orang, terlepas dari latar belakang mereka, untuk mengakses dan berpartisipasi dalam ruang partisipatif secara penuh (Holdo, 2020).

**b) Inklusivitas**

Inklusivitas dalam ruang partisipatif digital berarti bahwa platform tersebut menyambut dan menghargai partisipasi dari semua individu, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau sudut pandang mereka. Inklusivitas memerlukan kebijakan dan praktik yang aktif untuk memastikan bahwa semua suara, terutama yang berasal dari kelompok minoritas atau terpinggirkan, dapat didengar dan dihargai. Ini berarti bahwa platform harus dirancang untuk mendukung keragaman dan pluralitas, dengan mendorong partisipasi yang representatif dari berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, inklusivitas juga mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah, di mana semua individu merasa dihormati dan diterima. Ini bisa dilakukan melalui moderasi konten yang adil, pengaturan kebijakan anti-diskriminasi, dan penyediaan ruang bagi dialog yang konstruktif dan penuh rasa hormat.

**c) Kebebasan Berekspresi**

Kebebasan berekspresi adalah salah satu pilar utama dari ruang partisipatif yang terbuka dan inklusif. Ini berarti bahwa individu memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan ide mereka tanpa rasa takut akan represi atau diskriminasi. Kebebasan berekspresi mencakup hak untuk menyampaikan pandangan yang berbeda, mengkritik kebijakan atau tindakan tertentu, serta berpartisipasi dalam diskusi dan debat publik. Dalam lingkup digital, ini berarti platform harus melindungi pengguna dari ancaman sensor yang berlebihan dan memastikan bahwa kebijakan moderasi konten tidak digunakan untuk membungkam suara-suara yang sah.

**d) Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam ruang partisipatif digital berarti bahwa penyelenggara platform bertanggung jawab atas proses partisipasi dan memastikan bahwa semua partisipan diperlakukan dengan adil dan hormat. Akuntabilitas mencakup transparansi dalam kebijakan dan praktik platform, termasuk bagaimana konten dimoderasi, bagaimana data pengguna dikelola, dan bagaimana keputusan yang mempengaruhi partisipasi dibuat (Harvey, 2018). Penyedia platform harus menyediakan mekanisme untuk mengajukan keluhan dan menyelesaikan sengketa, serta memastikan bahwa pengguna memiliki akses ke informasi tentang hak dan tanggung jawab mereka.

**3. Manfaat Konsep Openness of Participatory Space**

Ruang partisipatif yang terbuka memiliki beberapa manfaat penting, antara lain (Goria & Konstantinidis, 2023):

**a) Meningkatkan partisipasi masyarakat**

Ruang partisipatif yang terbuka memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menciptakan platform di mana semua individu dapat menyuarakan pendapat, ide, dan aspirasi mereka. Ketika akses ke ruang-ruang ini terbuka lebar tanpa diskriminasi, lebih banyak orang merasa terdorong untuk terlibat dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Keberagaman partisipasi ini memungkinkan munculnya berbagai perspektif dan gagasan, yang pada gilirannya dapat memperkaya diskusi dan mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih representatif. Partisipasi masyarakat yang lebih luas juga berarti bahwa keputusan yang diambil cenderung lebih mencerminkan kebutuhan dan keinginan berbagai kelompok dalam masyarakat, sehingga meningkatkan legitimasi dan penerimaan keputusan tersebut.

**b) Meningkatkan akuntabilitas**

Ruang partisipatif yang terbuka memberikan masyarakat alat dan platform untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Ketika ruang partisipatif terbuka dan transparan, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengakses informasi penting, memantau tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat publik, serta menyuarakan keprihatinan dan masukan mereka. Mekanisme ini memperkuat akuntabilitas karena para pemangku kepentingan tahu bahwa tindakan mereka diawasi dan mereka harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat.

c) **Memperkuat demokrasi**

Partisipasi publik yang aktif dalam ruang partisipatif yang terbuka merupakan elemen penting dari demokrasi yang sehat. Demokrasi sejati bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang keterlibatan terus-menerus dari warga negara dalam proses pemerintahan. Ruang partisipatif yang terbuka memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam dialog, debat, dan kolaborasi yang berkelanjutan mengenai isu-isu yang mempengaruhi mereka. Ini memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dengan memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi yang aktif juga memupuk budaya demokrasi di mana warga negara merasa memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk mempengaruhi arah kebijakan dan pembangunan negara mereka.

## **B. Teori dan Pendekatan dalam Menganalisis Participatory Space**

### **1. Teori Demokrasi Partisipatif**

Teori demokrasi partisipatif menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagai landasan utama demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Menurut Carole Pateman (1970), partisipasi aktif warga negara tidak hanya memperkuat legitimasi demokrasi, tetapi juga mendorong keterlibatan yang lebih dalam dan komitmen terhadap keputusan kolektif. Ruang partisipatif yang terbuka dapat dilihat sebagai mekanisme untuk mewujudkan demokrasi partisipatif dengan memberikan platform bagi warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka, berbagi ide, dan terlibat dalam dialog yang konstruktif. (Harvey, 2018) menambahkan bahwa dalam demokrasi partisipatif, proses deliberasi publik yang inklusif dan transparan sangat penting untuk mencapai keputusan yang mencerminkan kehendak kolektif masyarakat. Dengan demikian, ruang partisipatif yang terbuka memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses politik dan sosial, menciptakan hubungan yang lebih erat antara masyarakat dan pemerintah, serta meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan atas keputusan yang diambil.

### **2. Teori Keadilan Sosial**

Teori keadilan sosial menekankan pentingnya inklusivitas dan kesetaraan dalam partisipasi, memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. John Rawls (1971) dalam karyanya "A Theory of Justice" (Reich, 2011) menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus memastikan distribusi sumber daya dan peluang yang adil bagi semua anggota masyarakat. Ruang partisipatif yang terbuka harus dirancang untuk menciptakan lingkungan di mana suara dari berbagai kelompok, termasuk mereka yang sering terpinggirkan, dapat didengar dan dihargai. Adapun keadilan sosial juga mencakup pengakuan atas keragaman identitas dan pengalaman individu, serta pemberdayaan kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili. Dengan demikian, ruang partisipatif yang terbuka berfungsi untuk menghilangkan hambatan partisipasi dan mendorong inklusivitas, menciptakan kondisi di mana setiap orang memiliki akses yang sama untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

### **3. Teori Komunikasi Publik**

Teori komunikasi publik menganalisis bagaimana ruang partisipatif digunakan untuk pertukaran informasi dan ide, serta bagaimana komunikasi yang terjadi di dalam ruang ini dapat mempengaruhi opini publik dan keputusan kolektif. Jürgen Habermas (1989) dalam teorinya tentang ruang publik menyatakan bahwa ruang partisipatif yang ideal adalah tempat di mana individu dapat berdialog secara bebas dan setara, bertukar pandangan, dan berdebat secara rasional untuk mencapai konsensus (White, 2017). Habermas menekankan pentingnya transparansi dan aksesibilitas dalam ruang publik untuk memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam diskusi. Ruang partisipatif yang terbuka harus memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan konstruktif, menghindari dominasi oleh kelompok tertentu, dan memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan. Dalam era digital, media sosial dan platform online telah menjadi arena baru untuk komunikasi publik,

yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam diskusi publik. Dengan demikian, ruang partisipatif yang terbuka di era digital harus dirancang untuk mendukung interaksi yang konstruktif dan inklusif, serta mempromosikan pertukaran ide yang sehat dan produktif.

### **C. Studi kasus: Pemanfaatan Platform Digital dalam Partisipasi Publik di Indonesia (Aplikasi KitaBisa)**

Platform digital telah menjadi alat penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam isu-isu publik dan politik. Salah satu platform yang populer digunakan di Indonesia adalah Kitabisa.com. Kitabisa adalah platform crowdfunding yang memungkinkan individu untuk menggalang dana untuk berbagai proyek dan kegiatan sosial. Platform ini telah digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membantu korban bencana alam, menyediakan akses pendidikan, dan mendukung usaha kecil menengah (Sidiq et al., 2021).

Kitabisa menawarkan beberapa fitur yang dapat digunakan untuk mendorong partisipasi publik. Pertama, kemudahan akses: Kitabisa dapat diakses dengan mudah melalui website dan aplikasi mobile, memungkinkan individu untuk memulai kampanye crowdfunding tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang rumit. Kedua, jangkauan luas: Kitabisa memiliki basis pengguna yang besar di Indonesia, sehingga kampanye crowdfunding dapat menjangkau banyak orang dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan dana. Ketiga, transparansi: Kitabisa menyediakan platform yang transparan dan akuntabel, di mana pengguna dapat melihat bagaimana dana digunakan dan siapa yang berkontribusi dalam kampanye. Terakhir, komunitas: Kitabisa memiliki komunitas yang aktif, memungkinkan pengguna untuk saling bertukar informasi, ide, dan dukungan, memperkuat solidaritas dan kolaborasi antar pengguna.

Salah satu contoh kampanye sukses di Kitabisa adalah kampanye "Peduli Korban Banjir Nusa Tenggara Timur". Kampanye ini berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp 1 miliar untuk membantu korban banjir di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan kampanye ini dapat diatribusikan pada serangkaian faktor yang mendukung. Pertama, dukungan dari influencer media sosial memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan visibilitas kampanye dan menarik lebih banyak donatur. Kolaborasi dengan influencer yang memiliki jangkauan yang luas membantu menggalang dukungan lebih besar dari masyarakat luas. Kedua, pilihan cerita yang disajikan dalam kampanye merupakan faktor penting. Dengan menghadirkan cerita yang menyentuh hati dan relevan dengan situasi yang dihadapi oleh korban banjir, kampanye mampu membangun ikatan emosional dengan potensial donor, mendorong mereka untuk turut berkontribusi. Ketiga, penggunaan media sosial secara efektif turut berperan dalam kesuksesan kampanye ini. Dengan memanfaatkan platform media sosial, kampanye dapat menjangkau audiens yang lebih luas, memperluas jangkauan pesan, dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.

Namun di tengah kesuksesan tersebut, terdapat tantangan-tantangan yang perlu diatasi seperti kesetaraan akses masih menjadi isu penting dalam memastikan partisipasi yang inklusif dalam platform digital seperti Kitabisa. Tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap internet dan teknologi, yang dapat menghambat mereka untuk terlibat dalam kampanye atau berdonasi secara online. Kedua, kepercayaan menjadi faktor krusial dalam menentukan tingkat partisipasi dalam platform crowdfunding. Beberapa individu mungkin merasa ragu untuk berdonasi secara online karena kekhawatiran akan kemungkinan penipuan atau penyalahgunaan dana. Membangun sistem yang transparan dan akuntabel dapat membantu mengatasi kekhawatiran ini. Serta yang terakhir adalah keterampilan digital juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Tidak semua orang memiliki tingkat keterampilan digital yang memadai untuk menggunakan platform digital dengan baik.

Namun begitu, platform crowdfunding seperti Kitabisa tetap menjadi instrumen yang kuat untuk memobilisasi partisipasi publik dalam berbagai isu sosial. Dengan mengadopsi pendekatan yang berfokus pada inklusivitas, transparansi, dan pendekatan yang berpusat pada pengguna, platform-platform semacam itu dapat terus memberikan peran yang signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan sosial.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan ruang partisipatif digital memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat akuntabilitas, dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Konsep keterbukaan tersebut mencakup aspek aksesibilitas, inklusivitas, kebebasan berekspresi, dan akuntabilitas. Melalui pendekatan teoritis seperti demokrasi partisipatif, keadilan sosial, dan teori komunikasi publik, kita dapat memahami pentingnya menciptakan lingkungan digital yang mendukung partisipasi aktif dan merata dari seluruh lapisan masyarakat. Studi kasus tentang

pemanfaatan platform digital seperti Kitabisa juga menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang inklusif dan transparan, platform-platform semacam itu dapat menjadi alat efektif untuk memobilisasi dukungan masyarakat dalam berbagai isu sosial. Meskipun masih ada tantangan seperti kesenjangan akses, kepercayaan, dan keterampilan digital, langkah-langkah menuju ruang partisipatif yang lebih terbuka dan inklusif dapat diambil melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

## B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan keterbukaan dan inklusivitas ruang partisipatif digital di Indonesia:

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk meningkatkan aksesibilitas internet dan teknologi digital di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal.
2. Kampanye edukasi dan pelatihan keterampilan digital perlu diperkuat untuk memastikan bahwa semua individu memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan platform digital dengan efektif dan aman.
3. Platform digital harus mengadopsi praktik-praktik transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat dalam pengelolaan konten, penggunaan data pengguna, dan penggunaan dana.

## REFERENSI

- Goria, C., & Konstantinidis, A. (2023). a Participatory Pedagogical Model for Online Distance Learning: Ideation and Implementation. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 24(1), 145–161. <https://doi.org/10.17718/tojde.1082978>
- Harvey, B. (2018). Negotiating Openness across Science, ICTs, and Participatory Development: Lessons from the AfricaAdapt Network. *Open Development*, 7(1), 275–296. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9724.003.0016>
- Holdo, M. (2020). Contestation in Participatory Budgeting: Spaces, Boundaries, and Agency. *American Behavioral Scientist*, 64(9), 1348–1365. <https://doi.org/10.1177/0002764220941226>
- Kozinets, R. V., & Jenkins, H. (2022). Consumer movements, brand activism, and the participatory politics of media: A conversation. *Journal of Consumer Culture*, 22(1), 264–282. <https://doi.org/10.1177/14695405211013993>
- Manca, S., Bocconi, S., & Gleason, B. (2021). “Think globally, act locally”: A glocal approach to the development of social media literacy. *Computers and Education*, 160(September 2020). <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104025>
- Ng, E. (2020). No Grand Pronouncements Here.: Reflections on Cancel Culture and Digital Media Participation. *Television and New Media*, 21(6), 621–627. <https://doi.org/10.1177/1527476420918828>
- Reich, Z. (2011). User Comments: The Transformation of Participatory Space. *Participatory Journalism: Guarding Open Gates at Online Newspapers*, October, 96–117. <https://doi.org/10.1002/9781444340747.ch6>
- Sidiq, R. S. S., Jalil, A., Willy, R., & Achmad, W. (2021). Virtual World Solidarity: How Social Solidarity is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa.com. *Webology*, 18(1), 192–202. <https://doi.org/10.14704/WEB/V18I1/WEB18083>
- Strömbäck, J., Tsfati, Y., Boomgaarden, H., Damstra, A., Lindgren, E., Vliegenthart, R., & Lindholm, T. (2020). News media trust and its impact on media use: toward a framework for future research. *Annals of the International Communication Association*, 44(2), 139–156. <https://doi.org/10.1080/23808985.2020.1755338>
- White, A. (2017). Digital Media and Society Transforming Economics, Politics and Social Practices. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Wohlwend, K. E. (2019). Who gets to play? Access, popular media and participatory literacies. *Early Years*, 37(1), 62–76. <https://doi.org/10.1080/09575146.2016.1219699>
- Yurchenko, I., Yurchenko, V., & Ganskii, P. (2020). Political Participation Problems In The Conditions Of Information Confrontation In Virtual Space. *EPSBS: The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 1234–1239. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.10.05.164>